

**PENGELOLAAN *BLOCKGRANT* SMA 1 BLORA
MENYONGSONG SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Memperoleh Gelar Magister

Pendidikan Dalam Bidang Manajemen Pendidikan

Konsentrasi Manajemen Sistem Pendidikan



OLEH:

RUMIYATI

NIM: Q. 100080024

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Semangat dan perjuangan Ki Hajar Dewantoro dalam upaya dan mencerdaskan kehidupan bangsa telah memberikan inspirasi yang tidak pernah kering, serta memberikan dorongan dan suri tauladan bagi generasi penerus bangsa untuk terus berjuang dan bekerja keras dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air .

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu yang paling urgen untuk merealisasikan amanat UUD 45 adalah melalui bidang pendidikan. Pembangunan dibidang pendidikan adalah berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 45, yang memungkinkan warganya mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Sebagaimana diketahui bahwa visi pembangunan pendidikan nasional adalah mewujudkan sistim pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia, tanpa terkecuali berkembang menjadi manusia yang berkualitas. Visi tersebut bertujuan untuk mencetak manusia Indonesia yang bersikap proaktif , tidak menunggu, tidak pasif dalam menjawab tantangan zaman yang berubah.

Sebagai harapan visi kedepan pendidikan nasional pada tahun 2025 dapat dihasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif , yaitu insan yang

cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional, cerdas secara sosial, dan cerdas secara intelektual (Presiden SBY, 2007:2).

Bila kita cermati permasalahan hidup di masa kini tampak nyata bahwa telah terjadi berbagai krisis kemanusiaan, bahkan sering dengan intensitas yang tinggi dan ragam yang kompleks. Pendidikan, sebagaimana kita ketahui bersama, memainkan peranan penting dalam membangun karakter manusia yang unggul, karakter manusia yang tangguh. Pendidikan memiliki tiga unsur penting, yaitu sebagai sarana untuk membina jati diri bangsa, identitas kita, merupakan karakter bangsa. Dalam pembinaan jati diri bangsa, pendidikan berperan untuk mengembangkan seseorang sehingga memiliki potensi yang berasal dari fitrah insani, dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pembinaan jati diri akan mendorong seseorang memiliki karakter yang tangguh, yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Tanpa jati diri bangsa suatu bangsa akan mudah terombang ambing dan kehilangan arah dari era globalisasi yang bergerak cepat, pendidikan berperan penting untuk menumbuhkan kembali karakter bangsa Indonesia yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang ramah-tamah, bergotong-royong, tangguh, dan santun.

Peran Pendidikan dalam peningkatan wawasan kebangsaan dapat dilakukan melalui pembentukan perubahan pola pikir yang semula berorientasi pada kesukuan menjadi berpikir kebangsaan secara utuh. Yang tadinya berfikir sempit, berfikir lebih luas. Melalui wawasan tersebut dapat dibangun masyarakat yang saling mencintai, saling menghormati, saling mempercayai dan saling melengkapi dalam menyelesaikan berbagai masalah.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) Bab 2 pasal 3 dikatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, dalam pasal 4 pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pemerintah atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, sesuai dengan (UU SISDIKNAS Psl 50 ayat 3), pasal 48 ayat 1 pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Memasuki era globalisasi, peran dunia pendidikan menjadi makin penting dan menentukan, sebab dengan pendidikan yang identik dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan dapat dikuasai. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dapat tercapai, yang sudah tentu harus didukung oleh ketersediaan

sumber daya manusia yang berkualitas salah satunya sangat tergantung pada mutu pendidikan.

Berdasarkan pengamatan dan hasil analisis yang dilakukan oleh Depdiknas (2000:1-3), sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata, yakni (1) Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *education production function* atau input-output analysis yang dilaksanakan secara tidak konsekuen, (2) Penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik sentralistik, (3) Peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan se lama ini sangat minim.

Berbagai upaya perbaikan dalam bidang pendidikan, yaitu dari manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menuju peningkatan mutu berbasis sekolah. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini merupakan model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih luas kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, karyawan maupun siswa serta masyarakat, baik orang tua atau pihak-pihak yang terkait dengan keberadaan suatu sekolah.

Tanpa mengesampingkan komponen lainnya, figur kepala sekolah ternyata paling berperan dalam menentukan tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya (Mulyasa, 2002:216). Untuk itu SMA yang merupakan pendidikan Menengah Atas dan salah satu sub sistem pendidikan juga harus dikembangkan dan ditingkatkan mutunya untuk mengantisipasi kebutuhan dan

tantangan masa depan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (anonim, 2004:5).

Bahwa Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan sarat perkembangan, karena itu perubahan atau perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan pada semua tingkat perlu terus menerus dilakukan sebagai antisipasi masa depan.

Dalam dunia pendidikan salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan disetiap jenjang pendidikan. Berbicara masalah mutu pendidikan berarti berbicara pula masalah mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut laporan UNDP tahun 2003 bahwa Indonesia berada di urutan 106 dari 112 negara yang disurvei, yaitu bahwa Sumber Daya Manusia Indonesia setingkat dibawah Vietnam dan diatas satu tingkat dengan Banglades .

Banyak masalah mutu yang dihadapi dalam dunia pendidikan, seperti misalnya mutu lulusan, mutu sarana dan prasarana pendidikan, mutu pembelajaran, mutu profesionalan dan kinerja guru, mutu-mutu tersebut terkait dengan mutu manajerial para pimpinan pendidikan serta dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Memang semua kelemahan mutu dari komponen pendidikan tersebut akhirnya berujung pada rendahnya mutu lulusan.

Pemerintah menilai telah terjadi kerancuan pengaturan anggaran dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(UU Sisdiknas). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Andi Mattalatta) mengungkapkan hal tersebut dalam sidang pengujian Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (15/1). Andi menjelaskan kerancuan UU Sisdiknas terjadi karena UU tersebut bersumber pada Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang mengamankan pembentukan UU tentang penyelenggaraan sisdiknas. Namun, ujaranya UU Sisdiknas mengatur juga mengenai pendanaan pendidikan, pengelolaan dana pendidikan, dan sebagainya (Cs Agnes: 2008). Sama seperti sebelum pelaksanaan Otonomi Daerah, bahan-bahan kebutuhan sehari-hari masih tetap mahal, biaya berobat mahal demikian pula biaya pendidikan dirasa oleh masyarakat sangatlah tinggi. Kondisi yang demikian ini bisa jadi disebabkan oleh tuntutan pelaksanaan otonomi daerah yang mengharuskan daerah lebih meningkatkan kemandiriannya. Mandiri dalam pengembangan wilayah, mandiri dalam penggalian pendapatan asli daerah juga mandiri dalam pembiayaan kebutuhan/kepentingan wilayah termasuk pembiayaan pendidikan.

Dalam hal pembiayaan pendidikan sekolah diharapkan tidak lagi menggantungkan dana operasional yang selama ini didapat dari pusat maupun APBD akan tetapi sekolah diharapkan mampu menggali sendiri dana dari para orang tua dan simpatisan lainnya. Subsidi pendidikan yang selama ini diberikan oleh pusat sedikit demi sedikit dikurangi bahkan pada saatnya nanti akan dihapuskan. Arah kebijakan subsidi diubah menjadi bentuk voucher, yaitu pemberian beasiswa langsung kepada siswa tidak mampu.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan menjadi prioritas utama. Disebutkan bahwa “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” (UUD 1945, Pasal 31). Amanat rakyat yang dituangkan dalam UUD 1945 menekankan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pendidikan bangsa dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional. Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 31 ayat 4, kemudian didukung dengan UU No. 20 tahun 2003 pasal 49 ayat 1 dengan tegas dinyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.

Pencantuman persentase anggaran pendidikan dalam UUD 1945 sesungguhnya merupakan reaksi dari tidak konsistennya komitmen pemerintah terhadap pembiayaan pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh naik turunnya persentase RAPBN untuk sektor pendidikan antara 6% sampai dengan 12%. Bahkan pada saat GBHN tahun 1993 menyatakan bahwa titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi seiring dengan pengembangan sumber daya manusia (termasuk di dalamnya pendidikan) tetap saja semangat itu tidak tercermin dalam RAPBN/RAPBD. Adanya *blockgrant* dari Pemerintah tetapi dana hanya didrop dan tidak didasarkan pada kebutuhan lapangan, aturan dan mekanisme kurang jelas serta tidak adanya transparansi.

Lebih lanjut dikatakan Rusdarti (2004) ditinjau dari pihak-pihak yang mengeluarkannya, biaya pendidikan dapat dikategorikan ke dalam biaya pribadi (private cost), biaya sosial (social cost), dan biaya yang ke tiga adalah biaya pemerintah (public cost). Biaya pribadi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua (keluarga) siswa (household expenditures) untuk kepentingan pendidikan. Biaya sosial merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk penyelenggaraan pendidikan, misalnya: beasiswa dari perusahaan, dan bantuan-bantuan lain yang diberikan oleh perusahaan. Biaya pemerintah merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diperoleh dari pendapatan pajak ataupun pendapatan lainnya untuk penyelenggaraan pendidikan. Sekiranya semua itu diwujudkan, maka pembiayaan pendidikan akan lebih ringan dan memungkinkan mutu pendidikan akan lebih baik. Akan tetapi otonomi daerah juga memicu keharusan Otonomi Sekolah, artinya sekolah (terutama Sekolah Negeri) yang selama ini sangat menggantungkan dana dari pusat harus memutar otak untuk mampu membiayai dirinya sendiri. Penyediaan alat dan bahan, pemeliharaan sarana-prasarana dan gedung semua itu harus ditanggung oleh sekolah. Sebagai sandaran utama untuk membiayai ini semua maka beban pembiayaan itu menjadi tanggung jawab orang tua.

Situasi perkembangan pendidikan sekarang, menunjukkan salah satu keadaan bahwa pada setiap permulaan tahun, hampir di seluruh Indonesia penerimaan murid baru senantiasa menjadi topik yang hangat. Sebab nya ialah, jumlah calon murid yang mendaftar jauh lebih banyak daripada kemampuan

daya serap sekolah-sekolah yang ada. Persoalan ini, pada umumnya lebih hangat di tingkatan SLTP dari pada SD, lebih hangat ditingkatan SLTA daripada SLTP, dan yang paling hangat adalah di tingkatan perguruan tinggi, karena piramida tingkatan pendidikan tidak sebanding.

Pada masa depan, persoalan ini mungkin lebih hangat lagi, oleh karena penambahan penduduk jauh melebihi penambahan kemampuan fasilitas. Maka persaingan untuk mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan akan makin keras lagi. Sehingga, perlu adanya kebijaksanaan yang ditempuh pada keadaan sekarang dan masa mendatang. Menjelang awal tahun ajaran baru orang tua siswa berhadapan dengan keperluan-keperluan tahun ajaran baru untuk memasuki sekolah berikutnya, seperti pendaftaran siswa baru, pembangunan sekolah, buku perpustakaan, buku pelajaran, SPP, seragam sekolah, seragam olah-raga, praktikum, olah-raga (renang), komputer, mushola (kegiatan keagamaan), ekstra kurikuler, dan pendaftaran seleksi calon siswa bagi sekolah lanjutannya.

Pendeknya, aksesibilitas masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah unggulan kian memuncak, namun banyak orang tua siswa menunjukkan tanda-tanda kegelisahan karena biaya pendidikan (unit cost) di sekolah-sekolah unggulan yang selangit. kegelisahan itu, akibat kebiasaan selama ini berbagai pungutan yang selalu menghantui, bahkan mungkin kegelisahan itu kian memuncak sehubungan dengan alokasi dana untuk pendidikan belum ada tanda-tanda sentuhan reformasi (Siswanto: 2008).

ISU pembiayaan sekolah menjadi penting jika dikaitkan dengan digulirkannya kebijakan anggaran pendidikan 20% mulai tahun anggaran 2009/2010, baik yang harus disediakan dalam kerangka APBN maupun APBD. Kajian tentang pembiayaan sekolah (*school funding*) menjadi relevan mengingat sistem pendidikan kita belum menganut asas pembiayaan sekolah secara integral yang berorientasi pada pengembangan aspek kualitas sebagai target pembiayaan sekolah.

Isu pembiayaan sekolah bermutu (*school quality funding*) masih dihitung secara minimal, yaitu menyangkut besaran subsidi dari pemerintah untuk tiap siswa pada setiap tingkat satuan pendidikan. Perdebatan yang ramai dibicarakan oleh para praktisi, birokrat, dan politisi di sekitar pembiayaan pendidikan pun baru menyentuh aspek kebutuhan siswa sebagai unit analisisnya, belum menghitung kebutuhan institusi sekolah sebagai sebuah pendekatan penjaminan mutu (*quality assurance*). Agar anggaran pendidikan 20% yang diamanatkan undang-undang dapat diserap secara efisien dan transparan, perlu dipikirkan skema-skema pembiayaan pendidikan dengan menggunakan sekolah sebagai unit analisis, bukan lagi kebutuhan siswa.

Dalam analisis satuan biaya pendidikan dasar dan menengah, Abbas Ghozali (2004) memperkenalkan ragam nomenklatur biaya satuan pendidikan yang dimaksudkan untuk mengetahui rekam jejak kebutuhan pembiayaan siswa per-anak per-tahun, dalam rangka menghitung besaran uang yang harus ditanggung orang tua dan subsidi yang harus disediakan pemerintah.

Beberapa studi tentang dampak kualitas sekolah terhadap capaian akademis siswa mengindikasikan pentingnya menciptakan sebuah budaya sekolah yang sehat secara manajemen. Dalam skema pembiayaan pendidikan, keberhasilan siswa dalam paradigma lama selalu bergantung pada kemampuan finansial orang tua dan karakter psikologis siswa serta kemampuan manajerial dan budaya sekolah (JS Coleman, *Equality of Education Opportunity*, 1966). Dalam banyak hal, kementerian pendidikan nasional sejauh ini belum mampu membangun sebuah budaya sekolah yang komprehensif dan visioner pada tingkat sekolah. Karena itu kebutuhan untuk membangun suasana belajar yang positif dan kondusif tidak jarang belum termasuk dalam komponen dan indikator pembiayaan pendidikan. Padahal jika kita merujuk pada hasil studi lainnya yang dilakukan oleh Rob Greenwald, et al, dalam *The Effect of School Resources on Student Achievement, Review of Educational Research* (1996), jelas terlihat strategi pembiayaan pendidikan di sekolah sangat berpengaruh terhadap capaian siswa.

Sekolah menyediakan dana yang cukup dan berkelanjutan untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Artinya, sekolah harus menyediakan dana pendidikan secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan sekolah. Untuk itu, sekolah berkewajiban menghimpun, mengelola, dan mengalokasikan dana untuk mencapai tujuan sekolah. Dalam menghimpun dana, sekolah perlu memperhatikan semua potensi sumberdana yang ada seperti misalnya subsidi pemerintah, sumbangan masyarakat/orangtua siswa, hibah, dan sumbangan perusahaan. Pengelolaan dana pendidikan di sekolah

harus dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Dana pendidikan di sekolah dialokasikan berdasarkan prinsip keadilan (equity/fairness) dan pemerataan (equality) yaitu tidak diskriminatif terhadap anggaran biaya yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan sekolah. Standar: Sekolah menyediakan dana pendidikan yang cukup dan berkelanjutan untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Sekolah menghimpun dana dari potensi sumber dana yang bervariasi. Sekolah mengelola dana pendidikan secara transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Dalam mengalokasikan dana pendidikan, sekolah berpegang pada prinsip keadilan dan pemerataan.

Pengelolaan dana sekolah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Standar peserta didik mencakup: (a) penerimaan siswa baru dan pengembangan/pembinaan siswa dan (b) ke luaran (output dan outcome).

Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Dalam lingkup sekolah, peserta didik adalah siswa. Siswa merupakan salah satu input yang sangat determinan bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Kesadaran akan hal perlu karena prestasi belajar siswa pada dasarnya merupakan upaya kolektif antara siswa dan guru.

Pada tataran input, setidaknya ada enam hal yang harus diperhatikan oleh sekolah yaitu seleksi siswa baru, penyiapan belajar siswa, pembinaan/pengembangan, pembimbingan, pemberian kesempatan, dan evaluasi hasil

belajar siswa. Seleksi siswa dimaksudkan untuk mendapatkan calon siswa baru yang memenuhi persyaratan baik akademis maupun non akademis yang diperlukan untuk sukses belajar. Penyiapan belajar siswa, baik mental maupun fisik, merupakan salah satu faktor dominan yang sangat berpengaruh pada kualitas proses pembelajaran. Makin tinggi tingkat kesiapan siswa, makin tinggi pula kualitas pembelajaran. Pembinaan dan pengembangan siswa, seperti misalnya, intelektual, spiritual, emosi, dan rasa merupakan tugas penting sekolah. Pemberian kesempatan kepada siswa dalam berbagai upaya sekolah seperti misalnya pengembangan kepemimpinan siswa, pengembangan kurikulum, pengambilan keputusan, dan perencanaan rekreasi, adalah merupakan contoh pemberian kesempatan kepada siswa. Yang tidak kalah penting dalam kaitannya dengan peserta didik adalah evaluasi belajar siswa.

Evaluasi hasil belajar siswa sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat keberhasilan siswa. Tanpa evaluasi, sulit untuk menyatakann tingkat kemajuan prestasi belajar siswa Standar: Penerimaan siswa baru didasarkan atas kriteria yang jelas, transparan dan dipublikasikan. Siswa memiliki tingkat kesiapan belajar yang memadai, baik mental maupun fisik.

Sekolah memiliki program yang jelas tentang pembinaan, pengembangan, dan pembimbingan siswa. Sekolah memberi kesempatan yang luas kepada siswa untuk berperanserta dalam penyelenggaraan program sekolah. Sekolah melakukan evaluasi belajar yang memenuhi persyaratan evaluasi.

Keluaran sekolah mencakup output dan outcome. Output sekolah adalah hasil belajar yang merefleksikan seberapa baik peserta didik mampu mengikuti proses pembelajaran. Idealnya, hasil belajar harus mengekspresikan tiga unsur kemampuan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Pertama, kemampuan kognitif tidaklah semata-mata mengukur prestasi belajar berupa NUAN saja, akan tetapi harus juga mengukur kemampuan berpikir ganda, seperti misalnya berpikir deduktif, induktif, ilmiah, kritis, kreatif, nalar, eksploratif, diskoveri, lateral, dan berpikir sistem. Kedua, hasil belajar harus juga mengukur kemampuan afektif, yang pada dasarnya adalah mengukur kualitas batiniah/karakter manusia, seperti misalnya iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kasih sayang, kejujuran, kesopanan, toleransi, tanggungjawab, keberanian moral, komitmen, disiplin diri, dan estetika. Ketiga, hasil belajar harus juga mengukur psikomotor, yang meliputi keterampilan olahraga (atletik, sepakbola, badminton, dsb.), kesehatan (daya tahan, bebas penyakit), dan kesenian (musik, visual, teater, dan kriya). Oleh karena itu, tidaklah cukup jika hasil belajar hanya diukur dengan hasil tes berupa NUAN.

Mengingat hasil belajar merupakan peleburan ketiga unsur kemampuan tersebut yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, maka hasil belajar dapat dikelompokkan kembali menjadi prestasi akademik, prestasi non-akademik, angka mengulang, dan angka putus sekolah. Prestasi akademik meliputi, misalnya, NEM, cara berpikir, lomba karya ilmiah remaja, lomba Fisika, Matematika, dan Bahasa Inggris. Prestasi non-akademik meliputi, antara lain,

karakter/kualitas pribadi, prestasi olah raga, prestasi kesenian, dan prestasi kepramukaan. Berpangkal pada pengelompokan hasil belajar tersebut, maka model penilaian yang digunakan tidak lagi semata-mata tes tertulis (kertas dan pensil), akan tetapi menggunakan model evaluasi terpadu, yang terdiri dari tes tertulis, tes kinerja, tugas-tugas, portofolio, dan proyek-proyek akademis/non-akademis yang dilakukan secara kerja kelompok. Model evaluasi seperti ini akan lebih valid, reliabel, obyektif, dan otentik untuk mengukur hasil belajar peserta didik.

Outcome adalah dampak jangka panjang dari output/hasil belajar, baik dampak bagi tamatan maupun bagi masyarakat. Idealnya, hasil belajar selalu terkait erat dengan outcome. Artinya, jika hasil belajar bagus, dampaknya juga akan bagus. Dalam kenyataan tidak selalu demikian karena outcome dipengaruhi oleh banyak faktor diluar hasil belajar. Outcome memiliki dua dimensi, yaitu: (1) kesempatan pendidikan dan kesempatan kerja, dan (2) pengembangan diri alumni. Sekolah yang baik memberikan banyak kesempatan/akses kepada alumninya untuk meneruskan pendidikan berikutnya dan kesempatan/akses untuk memilih pekerjaan. Sekolah yang baik juga membekali kecakapan alumninya untuk mengembangkan diri dalam kehidupan. Pengembangan diri yang dimaksud adalah pertumbuhan intelektualitas yang dihasilkan dari proses pembelajaran di sekolah.

Pada dasarnya, sekolah yang baik memiliki kepedulian terhadap nasib alumninya. Kepedulian tersebut diwujudkan dalam bentuk studi penelusuran, yang esensinya adalah pelacakan terhadap alumninya. Studi penelusuran ini

memiliki manfaat ganda yaitu, selain peduli terhadap alumninya, juga untuk mencari umpan balik bagi perbaikan program-program di sekolahnya sehingga mutu, relevansi, dan akses dapat ditingkatkan. Inilah fokus pendidikan yang sesungguhnya harus diperhatikan oleh sekolah. Standar: Sekolah menghasilkan output/hasil belajar yang memadai dalam prestasi akademik dan prestasi non-akademik (olah raga, kesenian, keagamaan, keterampilan kejuruan, dsb.). Sekolah menggunakan alat evaluasi yang relevan untuk mengukur hasil belajar ganda (prestasi akademik dan prestasi non-akademik), yang dibuktikan oleh tingkat validitas, reliabilitas, obyektivitas, dan otentisitas yang tinggi. Angka mengulang kelas dan angka putus sekolah relatif kecil. Selain itu, sekolah melakukan studi penelusuran alumni secara berkala untuk mengetahui status mereka, baik kesempatan melanjutkan pendidikan, kesempatan kerja, dan pengembangan diri alumni. Hasil studi penelusuran digunakan untuk memperbaiki program-program sekolah dan didokumentasikan secara rapi agar mudah diakses oleh siapapun yang membutuhkan

Idealnya, pendidikan mengajarkan siswa tentang kecakapan yang diperlukan untuk menjalani hidup dan kehidupan di masyarakat tingkat lokal, nasional, internasional. Oleh karena itu, apa yang dididikan di sekolah idealnya harus relevan dengan tuntutan-tuntutan nilai luhur dan harapan-harapan masyarakat. Lebih dari itu, pendidikan juga harus mampu mengubah masyarakat di sekitarnya. Jadi, hubungan simbiosis antara sekolah-masyarakat merupakan keniscayaan.

Disamping itu, sekolah akan tumbuh subur jika mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitarnya. Dukungan-dukkungan dari masyarakat, baik berupa finansial, moral, informasi, jasa (pemikiran, ide-ide, idealisme, keterampilan), maupun berupa barang, sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah.

Selanjutnya, konsekwensi logis dari otonomi pendidikan sangat jelas, yaitu pendidikan tidak lagi semata-mata merupakan kewenangan dan tanggungjawab pemerintah, tetapi masyarakat juga harus berperanserta secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan tidak lagi semata-mata dimonopoli dan berbasis pemerintah (swadaya pemerintah), akan tetapi juga berbasis masyarakat. Bahkan ada kecenderungan bahwa pendidikan masa depan adalah pendidikan berbasis masyarakat. Pada dasarnya, pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang diarahkan, dimiliki, dan didukung oleh masyarakat sekitar yang dilayani oleh institusi pendidikan (sekolah). Jadi, masyarakat memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan, baik sebagai mitra sekolah, sebagai penasehat, sebagai pendukung, dan sebagai pengontrol pendidikan di sekolah. Jika demikian, maka sekolah akan dipandang sebagai sekolah masyarakat dan bukannya sebagai sekolah pemerintah yang berada di masyarakat. Masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki identitas dan kepentingan berbeda-beda, misalnya kelompok-kelompok: orangtua siswa, organisasi profesi, organisasi buruh, organisasi pengusaha, akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, dokter, petani, yayasan, dan sebagainya. Dengan demikian,

hubungan sekolah-masyarakat bukan lagi sekadar penting, tetapi sudah merupakan keharusan.

Dalam kerangka itulah, Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Esensi kelembagaan ini adalah bahwa masyarakat memiliki peran sebagai pemberi pertimbangan (advisor), pendukung (supporter), penghubung (mediator), dan pengontrol (controller). Oleh karena itu, lembaga ini harus diberdayakan.

Standar: Peranserta masyarakat meliputi partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Hubungan antara sekolah-masyarakat, baik menyangkut substansi maupun strategi pelaksanaannya, ditulis dan dipublikasikan secara eksplisit dan jelas. Sekolah melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam pendidikan di sekolah melalui strategi-strategi sebagai berikut: (1) memberdayakan melalui berbagai media komunikasi (media tertulis, pertemuan, kontak langsung secara individual, dsb); (2) menciptakan dan melaksanakan visi, misi, tujuan, kebijakan, rencana, program, dan pengambilan keputusan bersama; (3) mengupayakan jaminan komitmen sekolah masyarakat melalui kontrak sosial; dan (3) mengembangkan model-model partisipasi masyarakat sesuai tingkat kemajuan masyarakat.

Sekolah bertaraf internasional adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan standar salah satu negara anggota Organization For

Economic Co-Operation And Development (OECD) dan atau Negara maju lainnya, Depdiknas Dirjen Mandikdasmen Direktorat PSMA (2009:9). Sedangkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah standar minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan meliputi standar: kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.

Kabupaten Blora, untuk tahun pelajaran 2009/2010 telah menerima bantuan *blockgrant* rintisan sekolah bertaraf internasional yaitu, SMA 1 Blora. Dana bantuan *blockgrant* diberikan oleh pemerintah pusat, dalam panduan pelaksanaan subsidi program pengembangan rintisan SMA bertaraf internasional (2009:3) memiliki tujuan khusus: a) meningkatkan mutu lulusan SMA sehingga mampu bersaing secara global dan setara dengan lulusan sekolah bertaraf internasional dari Negara lain, b) mendorong adanya gerakan persaingan yang sehat dalam peningkatan mutu pendidikan secara nasional dan, c) meningkatkan daya tawar sumber daya manusia Indonesia di luar negeri.

Dana bantuan *blockgrant* RSMABI diberikan selama empat tahun. Dalam kurun waktu empat tahun tersebut, sekolah harus mampu mencapai indikator-indikator sekolah bertaraf internasional yang telah ditetapkan. Maka pengelolaan *blockgrant* RSMABI sangat urgen, untuk menyongsong sekolah bertaraf internasional.

Dengan demikian peneliti bermaksud untuk melihat bagaimana SMA 1 Blora dalam pengelolaan *Blockgrant* Rintisan Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional (RSMABI).

B. Fokus penelitian

Berawal dari latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini yaitu pada pengelolaan *blockgrant* R-SMA-BI menyongsong Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) di SMA 1 Blora.

Berdasarkan fokus di atas, dirinci menjadi tiga sub fokus

1. Bagaimana karakteristik proses mendapatkan *Blockgrant* ?
2. Bagaimana karakteristik pengelolaan *Blockgrant* ?
3. Bagaimana karakteristik penggunaan *Blockgrant* ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengungkap, menganalisis secara jelas dan cermat terhadap karakteristik *Blockgrant* R-SMA-BI. Sesuai dengan fokus maka disusun menjadi tiga tujuan penelitian.

1. Karakteristik proses mendapatkan *Blockgrant*
2. Karakteristik pengelolaan *Blockgrant*
3. Karakteristik penggunaan *Blockgrant*

D. Manfaat Penelitian

Dari temuan hasil penelitian ini, disusun menjadi beberapa poin manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan renungan dan bahan kajian pihak-pihak yang berkompeten dalam dunia pendidikan,

khususnya dalam mengelola *blockgrant* dalam menyongsong Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi sekolah penerima bantuan, dapat dijadikan masukan dalam mengelola *blockgrant*.
- b. Bagi SMA 1 Blora, segai amanah yang besar untuk meningkatkan dan memajukan SMA 1 Blora dari RSMABI menjadi SBI.
- c. Bagi Guru, sebagai tantangan untuk meningkatkan Kompetensi Diri dan meningkatkan mutu pendidikan di SMA 1 Blora.
- d. Bagi Warga OSIS SMA 1 Blora, merupakan penghargaan untuk meningkatkan Prestasi dan berkompetisi dalam pendidikan, sehingga dapat bersaing dengan sekolah RSMABI di tingkat Provinsi, tingkat nasional maupun tingkat Internasional.
- e. Bagi pihak-pihak penentu kebijakan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten, dapat dijadikan data masukan memberi arahan dalam mengelola *blockgrant*.
- f. Bagi masyarakat luas, khususnya para koordinator fasilitator sebagai bahan masukan dan informasi yang berarti tentang perlunya pengelolaan *blockgrant*.

E. Daftar Istilah

1. Pengelolaan.

Pengelolaan dalam kamus besar bahasa indonesia edisi ketiga tahun 2001 adalah proses, cara, kedua: proses melakukan kegiatan tertentu

dengan menggerakkan tenaga orang lain, ketiga: proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, keempat: proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan Anton M Mulyono (2001:534)

2. *Blockgrant*

Blockgrant adalah dana bantuan yang diberikan dengan Cuma -Cuma secara langsung kepada pihak yang memerlukan dan pihak penerima memanfaatkan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh pihak pemberi, dalam info buletin pendidikan edisi III bulan Desember (2005:45)

3. Rintisan Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional (RSMABI).

Rintisan Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional adalah SMA nasional yang telah memenuhi seluruh standar nasional pendidikan, menerapkan sistem kredit semester dan dalam proses menuju SMA bertaraf internasional (hanya salah satu strategi menyiapkan SBI) dalam panduan RSMABI (2009:10).

4. Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)

Sekolah Bertaraf Internasional adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan standar salah satu negara anggota Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), dalam panduan penyelenggaraan program Rintisan Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional (2009:9).

5. SMA 1 Blora

SMA 1 Blora adalah Sekolah Menengah Atas yang terletak di jalan Tentara Pelajar No. 21 Blora, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, merupakan satu-satunya SMA di Blora yang mendapat *Blockgrant* RSMABI pada tahun 2009/2010.